

PENGARUH TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi Pada Desa Paomacang)

Reski Amalia Purti

Universitas Muhammadiyah Palopo

amaliaekki9@Gmail.Com

Abstrack: Tthe influence of transparency and supervision of village finances on village goverment performance

This study aims to examine the effect of transparency and village financial supervision on village government performance in Paomacang village, South Sukamaju district, North Luwu district. This research is motivated by the lack of capacity of government officials, both human resources and service innovation funding sources, the weak response of the village government in responding to community complaints and limited ADD information to the community. The method used in this research is descriptive quantitative research methods. Data collection techniques used by the author through questionnaires, interviews and observation. As for the respondents in this study were 75 people in Paomacang village which were divided into 3 hamlets. Based on the research results, it can be seen that 1) Transparency has no significant effect on the performance of the village government 2) Monitoring of village finance has a significant positive effect on the performance of the village government.

Keywords: Performance, Transparency, village financial supervision

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Transparansi Dan Pengawasan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Desa Paomacang, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara. penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya kapasitas aparatur pemerintah, sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana inovasi pelayanan, lemahnya respon pemerintah desa dalam menanggapi keluhan masyarakat serta terbatasnya informasi ADD kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis melalui Kuesioner, Wawancara dan Obsevasi. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 75 masyarakat desa Paomacang yang terbagi menjadi 3 Dusun. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui banwa 1) Transparansi berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah desa 2) Pengawasan keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.

Kata Kunci : Kinerja, Transparansi, Pengawasan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penetapan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan keberadaan desa sebagai topik dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan tugas kepada setiap daerah untuk

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta membentuk upaya kemandirian dengan kemampuan yang dimilikinya. Undang-undang tersebut memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa sendiri. Untuk itu, setiap desa akan diberi dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat relevan.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia memicu kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka

diupayakan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

(<http://www.bpkp.go.id>).

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan biaya yang layak. Dalam permendagri No. 13 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dijelaskan jika desa mempunyai beberapa sumber pendapatan desa yang terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Transfer
3. Pendapatan lain-lain

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan

daerah. Pengelolaan dana desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi serta pengawasan dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (*principle*) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015:9). Akuntabilitas publik adalah informan atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah sebuah pemaparan manajemen organisasi sektor publik mengenai aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan dengan sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015:18).

Proses perencanaan pembangunan desa perlu diimbangi oleh adanya beberapa hal seperti: kapasitas aparatur pemerintah, sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana. Bersamaan dengan hal ini, maka untuk mengukur tingkat pencapaian atas rencana yang ditetapkan dengan sasaran yang ingin dicapai perlu dilakukan evaluasi atas kinerja (Ramanadei, 2019).

Dalam *m.antarnews.com* Lembaga *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi melansir ada 53 perkara kasus penyalagunaan dana desa periode 2018-2019 yang tersebar di sejumlah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perkara tersebut melibatkan 52 orang terdakwa sebagai aktor korupsi dari aparat desa. Datanya, dari periode 2018-2019 jumlah kepala desa yang menjadi terdakwa korupsi dana

desa sebanyak 37 orang, dan 15 orang perangkat daerah sebagai terdakwa penyalahgunaan ADD.

Dalam *Fajar.co.id*. Kepala bidang pemerintahan desa dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) Luwu Utara, Ikdhianhi, mengakui belum ada pencairan dana desa dan dana penghasilan tetap (siltap) kepala desa. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban ini seharusnya sudah masuk pada 31 desember lalu. Namun, para kepala desa molor memasukkan pertanggungjawaban. Makanya, dana desa tidak bias cair. Hanya sebagian yang sudah memasukkan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Transparansi

Definisi Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi yang berkepentingan (Atmadja, 2013:19)

Sedangkan itu menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang diterima selaras dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi

memiliki beberapa ukuran, yaitu *Invormativeness* (informatif) dan *Disclosure* (pengungkapan) Mardiasmo (2009:19).

Transparansi pengelolaan keuangan dana desa wajib dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas Secara jelas. Informasi publik diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (PKI). Desa menjadi salah satu bagian dalam UU KIP tersebut. Namun, transparansi pengelolaan dana desa dianggap sebagai risiko bagi sebagian pejabat publik. Beberapa informasi mengenai kebijakan penggunaan dana desa biasanya hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Tertutupnya informasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dinilai

sensitif jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi. Sehubungan dengan kapasitas pengelolaan keuangan tersebut, ada dua aspek yang perlu dicermati, yaitu standar akuntansi keuangan dan pemanfaatan aplikasi keuangan desa.

Prinsip-prinsip Transparansi

Berikut beberapa prinsip dalam transparansi menurut Krina, Loina Lalolo (2003):

a) Sikap terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapnya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, baik hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas

hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

b) Menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Indikator Transparansi

Menurut Kristianton (2006:73) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

- a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c) Keterbukaan Proses
- d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Pengawasan Keuangan Desa

Definisi pengawasan

Pengawasan adalah suatu cara melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sesuai dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan

Tujuan Pengawasan

Pontas (2004) mengemukakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar pemerintahan dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan

yang bersih (*Clean Governement*).

Selain itu pengawasan internal pemerintah diharapkan dapat memotivasi instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional terlaksana sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan otonomi daerah, dan sumber dayanya demi memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Fungsi Pengawasan

Fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat/laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga, yang sudah diteliti.

Ernie (2005:12), fungsi dari pengawasan antara lain:

- a) Menilai keberhasilan dan pencapaian target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
 - b) Mengambil langkah penjelasan dan koreksi terhadap kekeliruan yang bisa saja ditemukan.
 - c) Menjalankan berbagai opsi solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.
- b) Memberikan penilaian, artinya menilai setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaan baik atau tidak.
 - c) Mengadakan korektif, tindakan ini dibuat untuk mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi.

Indikator Pengawasan

Adapun indikator pengawasan menurut Jufrizen (2016):

- a) Menentukan ukuran pelaksanaan, artinya cara untuk mengukur pelaksanaan minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.

Teori kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang diraih oleh seseorang). Dalam kamus bahasa indonesia (2002:273), istilah kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dapat dicapai menurut E, Mulyasa (2003), kinerja adalah “segala upaya yang dilakukan dengan mencapai tujuan”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Pasolong (2010:197), merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan Pasolong (2010), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan tugas tanggung jawab masing-masing agar mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

dengan hasil seperti yang diharapkan.

Pendapat lain dikemukakan King Patricia (1993), yang mengemukakan pengertian kinerja adalah kegiatan seseorang dalam menjalankan tugas pokok yang dimandatkan kepadanya. Berbeda lagi pendapat Moetherino (2012) yang mengatakan bahwa kinerja adalah capaian yang dapat dicapai

Berikut beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja menurut mangkunegara (2010):

a) Faktor kemampuan (*ability*)

Secara psikologi, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri kemampuan prestasi (IQ) dan kemampuan (*reality knowledge + skill*). Artinya, pegawai yang mempunyai IQ diatas rata-rata

IQ 110-120 dengan pendidikan yang cukup untuk jabatannya dan ahli dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diinginkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in the right place, the right man on the right job*).

b) Faktor motivasi (*motivation*)

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan keadaan yang mendorong diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

c) Faktor pengawasan

Pengawasan merupakan proses atau langkah pencegahan dari

tindakan-tindakan

penyimpangan fatal dan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan kecil yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan organisasi serta menjamin tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Faktor ini sangat erat kaitannya terhadap kinerja karena jika pengawasan tidak berkualitas maka kinerja pemerintah masih diragukan.

d) Faktor transparan

Pemerintah yang baik akan memperhatikan prinsip transparansi dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. komponen transparansi berhubungan dengan tuntutan

bagi aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai sehingga terciptanya kinerja pemerintah yang baik.

Indikator kinerja

Menurut Agus Dharma (2003) dalam bukunya indikator yang digunakan untuk mengkaji kinerja sebagai berikut:

a) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus dicapai. Pengukuran kuantitatif mengimplikasikan perhitungan keluaran dari proses

atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkenaan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.

b) Kualitas, yaitu kadar yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kuantitatif keluaran menggambarkan pengukuran tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluarannya.

c) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang ditetapkan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang mematok ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian,

dimana rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan hipotesis dikatakan

sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori (Sugiyono, 2009).

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Menurut Malhotra (2004), desain penelitian adalah kerangka kondisi suatu proyek riset, dimana didalamnya terdapat prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi dan memecahkan masalah-masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan-pendekatan Deduktif-Induktif.

Menurut Sugiyono (2010), Penelitian asosiatif kausal

H1: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa

H2: Pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa

merupakan penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih dan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain dan menurut Indriantoro, Nur Dan Bambang Supomo (2011:84), metode survey terdapat dua metode didalamnya yaitu kuesioner (pernyataan tertulis) wawancara (pertanyaan lisan). Kuesioner dapat langsung dikomunikasikan dan dikumpulkan. Wawancara dapat dilakukan dengan komunikasi tatap muka atau telepon. Dalam penelitian ini metode yang

digunakan peneliti adalah metode penilitin purposive sampling dan metode survei yaitu kuesioner.

Untuk menguji adanya pengaruh transparansi(X_1), pengawasan keuangan desa(X_2) terhadap kinerja pemerintah desa(Y). Analisis ini digunakan peneliti dengan tujuan untuk menggambarkan seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi. Secara umum persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pemerintah Desa

X_1 = Transparansi

X_2 = Pengawasan Keuangan Desa

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Hasil Uji Regresi Linier Berganda

KPD = a + TR + PKD			
Model	Coefficien t	T-Statistic	Sig
Konstanta	7.197	2.380	.020
Transparansi	.202	2.537	0.13
Pengawasan Keuanagan Desa	.641	5.316	.000
N = 75 R ² = .545 Adj.R ² = .532 F-Statistic = 43.074 Sig = .000 ^b			
Variabel dependen adalah KPD dan Variabel indeviden adalah TR dan PKD *Signifikan pada alpha = 0.05 TR adalah Transparansi, PKD adalah Pengawasan Keuangan Desa			

Sumber : data primer diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat dirumuskan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara transparansi, pengawasan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa, sebagai berikut:

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 7.197 + 0,202X_1 + 0,642X_2$$

Diketahui :

Y = Kinerja Pemerintah Desa

X_1 = Transparansi

X_2 = Pengawasan Keuangan
Desa

a = 7.197 apabila transparansi dan pengawasan keuangan desa dalam keadaan konstan atau 0 maka kinerja pemerintah desa nilainya sebesar 7.197

b_1 = 0,202 adalah besarnya koefisien regresi X_1 (transparansi) yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,202 atau 20,2%. Jika variabel transparansi meningkat maka kinerja pemerintah desa akan meningkat dan memiliki arah hubungan positif.

b_2 = 0,642 adalah besarnya koefisien regresi X_2 (pengawasan keuangan desa)

yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,642 atau 64,2%. Jika variabel pengawasan keuangan desa meningkat maka kinerja pemerintah desa akan meningkat dan memiliki arah hubungan positif.

Penelitian ini melibatkan 75 responden, untuk memberikan informasi mengenai Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. Dimulai dari hasil uji validitas yang menunjukkan bahwa hasil pernyataan angket yang disebar untuk 75 responden dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Kemudian hasil uji reliabilitas pada penelitian inipun reliabel karena semua koefisien $> 0,60$.

Hasil analisis uji F (uji signifikan simultan) diketahui bahwa nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 43,074 > F_{tabel} 3,97$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil analisis uji t berdasarkan Hipotesis pertama diketahui untuk variabel transparansi (X_1) $t_{hitung} = 2,537 > t_{tabel} = 2,064$ dengan signifikan $0,013 > 0,05$ artinya transparansi tidak terdapat pengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. sedang hipotesis kedua diketahui untuk variabel pengawasan keuangan desa (X_2) $t_{hitung} = 5,316 > t_{tabel} = 2,064$ dan signifikan $0,00 < 0,05$, artinya pengawasan keuangan desa berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Uji R (koefisien determinasi) sebesar 0,545

menunjukkan bahwa variabel transparansi dan pengawasan keuangan desa secara simultan terhadap kinerja pemerintah desa sebesar 54.5%, sedang yang 53.75% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa

Hasil uji empiris pengaruh antara transparansi terhadap kinerja pemerintah desa menunjukkan nilai $t_{hitung} 2,537$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} 2,064$ dan value (*sig*) sebesar 0.013 lebih besar alpha 5% hal ini menandakan bahwa ada pengaruh antara transparansi terhadap kinerja pemerintah desa yang tidak signifikan. penyebab variabel transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dikarenakan transparansi melalui pemerintah desa

mengungkapkan tentang informasi keuangan dan non-keuangan kepada masyarakat melalui media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan haknya. ketika transparansi meningkat maka kinerja pemerintah desa juga meningkat. Jadi jika pemerintah desa ingin meningkatkan kinerja pemerintah desa maka harus meningkatkan transparansinya. Dari tabel 4.7 dapat dilihat pada kolom $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0.227, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Selanjutnya pada tabel 4.8 yaitu hasil uji reliabilitas dimana masing-masing variabel memiliki $\alpha > 0,60$ pada variabel transparansi, pengawasan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa dapat dikatakan reliabel.

Hasil penelitian menerima hipotesis 1 yang menyatakan “transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa”. Nilai beta dalam *Unstandardized Coefficients* variabel transparansi menunjukkan angka sebesar 0,202. Yang artinya adalah besaran koefisien transparansi terhadap kinerja pemerintah desa adalah sebesar 20,2%.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa didukung oleh Putri,M. Suharno, Widarno, B (2015), Gobel (2017) dan Nurahmi (2019) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nicolla (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi secara parsial tidak mempengaruhi

kinerja pemerintah desa namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan

Pengaruh pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa

Hasil uji parsial pengaruh antara pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa menunjukkan nilai $t_{hitung} 5.316 >$ nilai $t_{tabel} 2.064$ dan P value (*sig*) sebesar 0.000 yang dibawah alpha 5% itu menandakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. itu artinya bahwa pengawasan keuangan desa dapat mendorong pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional berjalan sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam

mengembangkan kreativitas daerah, dan sumber dayanya demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Demikian penyebab dari pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa adalah pengawasan desa telah menjelaskan tentang hasil yang dicapai dalam setiap kegiatan.pemerintah mempunyai pedoman dan prosedur kerja menyeluruh jenjang organisasi yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Dari tabel 4.6, dapat dilihat pada kolom r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0.227, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Selanjutnya pada tabel 4.7 yaitu hasil uji reliabilitas dimana masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* $> 0,60$ pada variabel (transparansi, pengawasan keuangan

desa dan kinerja pemerintah desa) dapat dikatakan reliabel.

Hasil penelitian menerima hipotesis 2 yang menyatakan “pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa”. Dapat dilihat dari nilai beta dalam *Unstandardized Coefficients* variabel pengawasan keuangan desa menunjukkan angka sebesar 0,641. Yang artinya adalah besaran koefisien pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa adalah sebesar 64,1%.

Hasil penelitian ini adalah pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan didukung oleh Penelitian yang dilakukan Oleh Putri,M. Suharno, Widarno, B (2015), Adha dan Ernawati (2016) yang meneliti tentang pengaruh pengawasan keuangan desa terhadap

kinerja pemerintah desa dengan hasil penelitian bahwa secara parsial pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Namun sebaliknya Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dan data yang diperoleh dari penelitian sebagaimana telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa hal ini menandakan bahwa hipotesis 1 diterima. Ini merupakan wujud nyata pemerintah desa terutama

pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi. Disamping itu, transparansi yang dilakukan pemerintah desa kepada publik merupakan bentuk keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kepentingan masyarakat dalam hal ini bukti bahwa kinerja pemerintah desa semakin membaik jika transparansi ditingkatkan.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas, untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa, pemerintah desa juga harus meningkatkan kemampuan atau keahlian aparat pengelola dana desa dengan mengadakan pelatihan atau

2) Pengawasan keuangan desa berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. hal ini menandakan bahwa hipotesis 2 diterima. Dengan demikian kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik, pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang diperlukan untuk mengarahkan para bawahannya dengan baik agar terhindar dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN).

sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa juga memberikan kepercayaan terhadap masyarakat agar program-program desa bisa terealisasikan dengan bantuan masyarakat. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kinerja pemerintah desa meningkat

karena transparansi dan variabel penelitian seperti pengawasan keuangan desa juga pemanfaatan teknologi informasi meningkat. dan partisipasi masyarakat yang

2. Bagi Peneliti Selanjutnya akan mempengaruhi kinerja

Saran bagi peneliti selanjutnya, pemerintah desa.

di harapkan dapat menambah

Daftar pustaka

- Atmadja, Anantawikraman Tungga. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Agus Dharma.2003. *Manajemen Supervisi: Petunjuk praktis bagi para supervisor*. Edisis Revisi. Cetakan Kelima.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Adha, A.H., & Ernawati, E(2016). Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Arifianti, H. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia) (Doctoral Dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Arief Rahman, S. E., & Com, M.(2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).
- Aziz, A. (2016) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)’, *Eksis*, 11(1), pp. 86–101. Available at: <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>.
- Bayu Surianingrat1980. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, Jakarta.

- Dadang, Kurnia. 2015. Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Disampaikan Pada Sosialisasi Pelaksanaan Uun No.6 TentangDesa”Kemenko Bid. Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
- Dessler, Gary, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesembilan, Jilid 1, PT.Indeks Kelompok Gramedia.
- E.Mulyasa 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Erni, Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Prenada Media. Jakarta.
- Gobel.S.V.2017.Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.
- Hasan, Iqbal, 2001. *Pokok-Pokok Materi Statistic 1 (Statistic Deskriptif)*. Pt Bumi Aksara. Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011, “*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*”, Edisi Pertama. BPFE, Yokyakarta.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro.Semarang.
- Jufrizen.2016. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja Pada PT.Socfin Indonesia Medan.Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis UMSU, 17(02)
- Kristianton 2006. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- King, Patricia. (1993). *Performance Planning Appraizal: A How-To Book For Manager*. McGraw-Hill Book Company. New York, St. Louis San Francosco Hlm 19.
- Kresnamurti, R. P, & Putri, A. (2012). Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Produk Oli Federal Di Wilayah Jakarta Timur (Studi Kasus Pada Bengkel Resmin Ahadd 2657 Dewi Sartika).
- Miftahuddin.2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

- Moehariono.2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Rajawali Pers. Jakarta
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Malhotra, N.K. 2004. *Marketing Research: An Applied Orientation.4th Edition* New Jersey: Person Education Inc.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta
- Mangkunegara. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, H. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nurahmi.2019.Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.
- Nurkhasannah.2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- Nicolla.2019. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Putra, N. (2016). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara.
- Primadona, Alamanda. 2013. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung). Skripsi, Universitas Komputer, Indonesia.
- Priyatun, I. (2016). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Universitas Negeri Lampung. Lampung.
- Pontas R. Siahhan. 2004. Pengelolaan SDM dalam Rangka Penerapan Good Corporate Governance, Makalah dalam workshop GCG bagi Pegawai

Duputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian di Pusdiklat Pengawasan Bpkp Gadog, Bogor.

Pasolong, Harbani.2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.

Putri, M. Suharno, Widarno, B (2015). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Majenang Sukandono Sragen). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1).

Rulyanti, D. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *BISMA*, 11(3), 323-335

Ramanadei, P. (2009). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan System Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura) (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).

Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *BISMA*, 11(3), 323-335

Suharyadi dan purwanto.2011. *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*.Edisi 2.Salemba Empat : Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.

Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

Suryoatmono, Bambang. 2004. *Statistika Non Parametrik Dan Penerapannya Dalam Penelitian Manajemen*. Bandung.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

- Sugeng. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah dan implikasinya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* Juli. 1 (2): 16-26.
- Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Kandung, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Dipublikasikan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wiguna, M. B. S., Yuniarta, G. A., AK S., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *JIMAT(Jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi) undiksha*, 3(1).
- Wida, S.A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 14-152.